KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kabar delapan WNI bergabung ke tentara Rusia menuai polemik
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1

Kabar Delapan WNI Bergabung Ke Tentara Rusia Menuai Polemik

Deretan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan tentara negara lain semakin bertambah. Terbaru, ada delapan WNI yang dikabarkan bergabung dengan tentara Rusia. Kabar ini pun menuai polemik di masyarakat.

Kedelapan nama tersebut, yakni Yuda Putra Pratama (kelahiran 9 Agustus 1997), Haryanto Dwi Kencana (kelahiran 14 Juli 1983), Erwanda (kelahiran 5 Agustus 1988), Ngangun Hudri Fadli (kelahiran 17 September 1978), Muhammad Syaripudin (kelahiran 3 Agustus 1994), M Hadi Maulana (kelahiran 7 April 1987), Wahyu Oktavian Iskandar (kelahiran 22 Oktober 1985), dan Helmi Nuraha Hakim (kelahiran 27 Januari 1983).

Kabar itu diungkapkan oleh Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina melalui situs resminya, Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Data tersebut menyebut delapan Warga Negara Indonesia (WNI) direkrut menjadi tentara bayaran Rusia.

"Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah memperoleh dokumen tentang setidaknya delapan warga negara Indonesia yang direkrut ke dalam barisan tentara pendudukan RF," demikian pernyataan FISU di situs resminya, Selasa (1/9/2026).

Menanggapi informasi itu, Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Pemerintah Indonesia tengah melakukan verifikasi atas informasi tersebut melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebut Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut," kata Yvonne dalam keterangannya, Senin (31/8).

Dia menyebut Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Penerapan ketentuan tersebut didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yvonne mengimbau agar para WNI berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik, maupun tawaran yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing.

"Apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing dimaksud terverifikasi, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia," kata Yvonne.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, membantah jika bergabungnya delapan WNI ke tentara Rusia merupakan bukti bahwa negara kecolongan. "Saya rasa keliru kalau langsung disimpulkan sebagai kegagalan pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah mengatakan, bergabungnya WNI dengan tentara negara lain merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa bagi Indonesia, Rusia, dan dunia.

Untuk melihat lebih jauh pandangan dan pendapat Teuku Rezasyah dan Dave Laksono terkait delapan WNI yang bergabung dengan tentara Rusia, berikut wawancaranya.

DAVE LAKSONO,
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Keliru, Jika Disebut Kegagalan Pengawasan

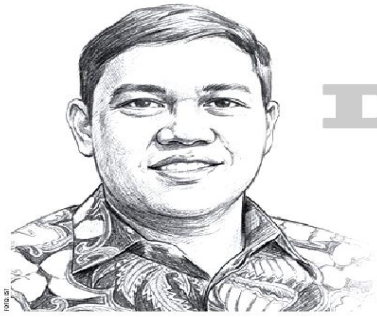

> Sosialisasi publik soal konsekuensi hukum ini juga perlu diperluas, khususnya menyasar kelompok usia produktif yang paling rentan terhadap tawaran kerja luar negeri.

Kabar terbaru, ada delapan WNI yang telah menjadi tentara Rusia. Bagaimana pandangan Anda?

Terkait kabar delapan WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia, saya prihatin.

Kenapa?

Karena ini bukan kasus pertama. Pola berulang ini menunjukkan adanya jaringan perekrutan yang aktif menyasar warga kita dengan iming-iming penghasilan besar, tanpa pernah menjelaskan apa yang sebenarnya menanti mereka di lapangan.

Bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka?

Dari sisi hukum, posisinya sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa WNI yang masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden akan kehilangan status kewarganegaraannya.

Saya mengimbau masyarakat untuk memahami betul konsekuensi ini sebelum tergiur tawaran yang terdengar menjanjikan, tetapi berujung pada hal yang fatal. Gaji besar dan janji kewarganegaraan asing yang dipercepat tidak akan pernah sebanding dengan taruhannya, yaitu status WNI yang hilang, perlindungan hukum dan diplomatik dari negara yang ikut lenyap, hingga nyawa yang dipertaruhkan di garis depan konflik orang lain. Ancaman ini tidak cukup diselesaikan melalui imbauan saja.

Apa yang mesti dilakukan oleh Pemerintah?

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, dan Ditjen Imigrasi untuk memetakan dan memutus rantai jaringan perekrutan tersebut, termasuk yang bergerak melalui media sosial.

Apakah perlu sosialisasi kepada masyarakat?

Sosialisasi publik soal konsekuensi hukum ini juga perlu diperluas, khususnya menyasar kelompok usia produktif yang paling rentan terhadap tawaran kerja luar negeri.

Ada yang menilai peristiwa bergabungnya delapan WNI menjadi tentara Rusia merupakan bukti Pemerintah kecolongan?

Adapun soal apakah negara kecolongan, saya rasa keliru kalau langsung disimpulkan sebagai kegagalan pengawasan karena bergabung dengan militer asing pada akhirnya tetap merupakan pilihan individu yang harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh yang bersangkutan. ■ REN

TEUKU REZASYAH,
Dosen Hubungan Internasional, President University

Berpotensi Merusak Hubungan Bilateral

> Pemerintah perlu melakukan penelitian yang mendalam guna mengetahui akar masalah di dalam negeri dan faktor-faktor yang memudahkan penjaringan WNI sehingga dapat berada di wilayah konflik.

Bagaimana tanggapan Anda dengan bergabungnya delapan WNI ke tentara Rusia?

Delapan WNI yang menjadi tentara Rusia merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa bagi Indonesia, Rusia, dan dunia.

Kenapa semakin banyak WNI yang bergabung dengan tentara negara lain?

Bagi sebagian kecil masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang berpikiran pendek, terbuka sebuah lapangan kerja baru yang sangat menjanjikan untuk sebuah masa depan yang stabil.

Bagi Pemerintah Rusia, tentunya mereka menyatakan tidak sekalipun melakukan penjaringan prajurit asing untuk selanjutnya menjadi Warga Negara Rusia. Karena perbuatan ini bertentangan dengan fungsi diplomatik.

Bagi dunia, mereka dapat saja menilai bahwa masyarakat Indonesia siap dilatih untuk menjalankan berbagai tugas pertempuran.

Apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah?

Perlu dilakukan tinjauan kritis atas hal ini. Mengingat walaupun sudah ada delapan prajurit yang terbongkar identitasnya, tidak mustahil jumlah yang beredar sebenarnya di atas itu.

Karena itu, Pemerintah perlu melakukan penelitian yang mendalam guna mengetahui akar masalah di dalam negeri dan faktor-faktor yang memudahkan penjaringan WNI sehingga dapat berada di wilayah konflik.

Apa dampaknya dari kasus ini?

Masuknya delapan WNI menjadi tentara Rusia tentunya berpotensi mengganjal hubungan bilateral RI-Rusia yang sudah sangat baik.

Pemerintah RI dan Rusia perlu mengkaji hal ini. Karena tidak mustahil berita ini adalah sebuah rekayasa untuk memperburuk hubungan RI-Rusia.

Pemerintah RI dan Ukraina juga perlu mengkaji hal ini. Karena tidak mustahil terdapat berbagai pihak yang berkepentingan dengan rusaknya hubungan RI-Ukraina.

Apakah Pemerintah perlu memperdalam kasus ini agar tidak terulang kembali?

Pemerintah RI perlu berkomunikasi dengan keluarga dari delapan WNI tersebut guna mengetahui secara mendalam seluruh rangkaian proses yang terjadi sehingga membuat mereka berani menanggalkan status WNI mereka.

Pemerintah RI perlu segera memiliki kemampuan pengendalian sistem informasi sehingga dapat sejak dini mencegah penjaringan yang secara langsung maupun tidak langsung menyasar mereka yang membutuhkan pekerjaan. ■ REN